



# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENATAAN RUANG LAUT

TRIWULAN III  
TAHUN 2025

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah:**

Effin Martiana

### **Penyusun:**

Bambang Prajoko

Muhajah Babny Muslim

Enny Syafrida Marpaung

Tri Setiyo Wisnu Wardoyo

Anugerah Satria Octoberta

Wahyu Setiawan

### **Kontributor:**

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

## KATA PENGANTAR

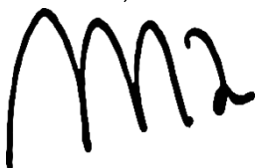
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) Triwulan III Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Setditjen PRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Setditjen PRL pada Triwulan III Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Setditjen PRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Setditjen PRL.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kegiatan kedepan. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PRL, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan masa mendatang.

Jakarta, 17 Oktober 2025



**Effin Martiana**

Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PRL Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PRL terdapat 21 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2025 sebesar 117,13 (termasuk kriteria istimewa).

Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 5 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL tercapai 88,94 dari target 66; 2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL tercapai 100 dari target 80; 3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL tercapai tercapai 100 dari target 80; 4) Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun tercapai 1 sesuai target; 5) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL tercapai 100 dari target 76.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Setditjen PRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPRL. Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PRL Tahun 2025 adalah Rp4.534.770.000,- dengan sumber dana Rupiah Murni (RM). Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp470.927.000,-. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PRL sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp3.378.110.439 atau 74,49% dari total pagu anggaran termasuk blokir dan 83,13% dari pagu anggaran efektif.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 yakni keterbatasan SDM yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PRL ke depan, sedang

dilakukan Analisis Beban Kerja untuk memetakan kembali kebutuhan pegawai di lingkup Setditjen PRL.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                    | <b>ii</b>   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>                                                                               | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                        | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                     | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                      | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                 | <b>1</b>    |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....                                                                                       | 1           |
| 1.2 TUJUAN .....                                                                                               | 1           |
| 1.3 ISU STRATEGIS .....                                                                                        | 2           |
| 1.4 TUGAS DAN FUNGSI .....                                                                                     | 2           |
| 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....                                                                                | 4           |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                                                                        | <b>5</b>    |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                                                     | <b>11</b>   |
| 3.1 SK 1. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL<br>YANG BAIK LINGKUP DITJEN PENATAAN RUANG LAUT .            | 15          |
| IK 1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL .....                                                                | 15          |
| IK 2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL .....                                                        | 19          |
| IK 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL .....                                                    | 22          |
| IK 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL .....                                                | 26          |
| IK 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan<br>untuk Perbaikan Kinerja DJPRL .....         | 29          |
| IK 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan<br>untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL ..... | 30          |
| IK 7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL .....                                                     | 32          |
| IK 8. Laporan SPIP Setditjen PRL yang Disusun .....                                                            | 34          |
| IK 9. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI<br>atas LK DJPRL .....                     | 36          |
| IK 10. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL .....                                                                  | 37          |
| IK 11. Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL .....                                                          | 40          |
| IK 12. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang<br>Diselesaikan sesuai Ketentuan .....            | 43          |
| IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL .....                                                          | 46          |
| IK 14. Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut<br>yang Dihasilkan .....                        | 49          |
| IK 15. Presentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati .....                                                     | 52          |

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IK 16. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja<br>Sama Luar Negeri yang Disusun..... | 57        |
| IK 17. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik.....                                             | 63        |
| IK 18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL.....                                                  | 66        |
| IK 19. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut<br>.....                           | 69        |
| IK 20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL .....                                                | 72        |
| IK 21. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan<br>pada SIRUP DJPRL.....                  | 75        |
| 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....                                                                       | 77        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                                                            | <b>79</b> |
| 4.1 KESIMPULAN .....                                                                                  | 79        |
| 4.2 REKOMENDASI.....                                                                                  | 80        |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                 | <b>81</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GAMBAR 1 NILAI CAPAIAN KINERJA SETDITJEN PENATAAN RUANG LAUT TRIWULAN III TAHUN 2025 .....                                                                                                                                                                                  | 11 |
| GAMBAR 2 PERKEMBANGAN IP ASN KKP SEPTEMBER 2025 .....                                                                                                                                                                                                                       | 39 |
| GAMBAR 3 PERKEMBANGAN IP ASN DJPRL SEPTEMBER 2025 .....                                                                                                                                                                                                                     | 41 |
| GAMBAR 4 KEGIATAN KOORDINASI PENJAMINAN KULAITAS IGT MATERI TEKNIS PERAIRAN PESISIR PADA RTRWP .....                                                                                                                                                                        | 51 |
| GAMBAR 5 RAPAT IDENTIFIKASI DATA UTAMA LINGKUP DJPRL DAN PEMBAHASAN OMS LAUTRA .....                                                                                                                                                                                        | 51 |
| GAMBAR 6 PENANDATANGAN PKS DENGAN PT DANAREKSA (PERSERO) ..                                                                                                                                                                                                                 | 55 |
| GAMBAR 7 PENANDATANGAN PKS ANTARA DITJEN PRL DENGAN YAYASAN KONSERVASI CAKRAWALA INDONESIA PADA TANGGAL 15 JULI 2025..                                                                                                                                                      | 56 |
| GAMBAR 8 PENANDATANGAN PKS ANTARA DITJEN PRL DENGAN PT INFORMASI GEO SISTEM PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2025 .....                                                                                                                                                            | 56 |
| GAMBAR 9 PERTEMUAN BBNJ AGREEMENT PREPARATORY COMMISSION 2, DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, 18 – 29 AGUSTUS 2025 .....                                                                                                                                                        | 62 |
| GAMBAR 10 <i>THE SECOND PART OF THE FIFTH SESSION OF THE INTERGOVERNMENTAL NEGOTIATION COMMITTEE TO DEVELOP AN INTERNATIONAL LEGALLY BINDING INSTRUMENT ON PLASTIC POLLUTION, INCLUDING IN THE MARINE ENVIRONMENT (INC 5.2)</i> DI JENEWA, SWISS, 4 – 14 AGUSTUS 2025 ..... | 63 |
| GAMBAR PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT TAHUN 2025 .....                                                                                                                                                                              | 81 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABEL 1 KOMPOSISI PEGAWAI DI SETDITJEN PRL .....                                                                                   | 3  |
| TABEL 2 INDIKATOR KINERJA SETDITJEN PRL TAHUN 2025-2029 DALAM RANCANGAN RENSTRA DJPRL TAHUN 2025-2029 .....                        | 7  |
| TABEL 3 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SETDITJEN PRL TAHUN 2025 ....                                                                 | 9  |
| TABEL 4 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SETDITJEN PRL TRIWULAN III TAHUN 2025 .....                                         | 11 |
| TABEL 5 KATEGORI NILAI PM SAKIP .....                                                                                              | 16 |
| TABEL 6 CAPAIAN IK NILAI PM SAKIP DJPRL .....                                                                                      | 17 |
| TABEL 7 PERBANDINGAN NILAI AKIP DJPKRL TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025 .....                                                             | 18 |
| TABEL 8 KATEGORI NILAI PM SAKIP .....                                                                                              | 20 |
| TABEL 9 CAPAIAN IK NILAI PM SAKIP SETDITJEN PRL .....                                                                              | 21 |
| TABEL 10 CAPAIAN IK NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) DJPRL.....                                                           | 24 |
| TABEL 11 CAPAIAN IK NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPRL .....                                                | 27 |
| TABEL 12 NILAI SEMENTARA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPKRL TRIWULAN III TAHUN 2025 .....                        | 27 |
| TABEL 13 CAPAIAN IK PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DJPRL.....                   | 29 |
| TABEL 14 CAPAIAN IK PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA SETDITJEN PRL..              | 31 |
| TABEL 15 CAPAIAN IK NILAI MATURITAS STRUKTUR DAN PROSES SPIP DJPRL.....                                                            | 33 |
| TABEL 16 CAPAIAN IK LAPORAN SPIP SETDITJEN PRL YANG DISUSUN .....                                                                  | 35 |
| TABEL 17 CAPAIAN IK BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LK DJPRL PADA TRIWULAN III TAHUN 2025 ..... | 36 |
| TABEL 18 CAPAIAN IK INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DJPRL.....                                                                  | 38 |
| TABEL 19 CAPAIAN IK INDEKS PROFESIONALITAS ASN SETDITJEN PRL .....                                                                 | 41 |
| TABEL 20 CAPAIAN IK PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN REFORMASI BIROKRASI YANG DISELESAIKAN SESUAI KETENTUAN.....                       | 45 |

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABEL 21 CAPAIAN IK TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN DATA DJPRL                                                        | 48 |
| TABEL 22 CAPAIAN IK PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN DATA<br>PENATAAN RUANG LAUT YANG DIHASILKAN .....                | 50 |
| TABEL 23 CAPAIAN IK PRESENTASE DOKUMEN KERJA SAMA YANG<br>DISEPAKATI.....                                           | 53 |
| TABEL 24 CAPAIAN IK PERSENTASE PEMENUHAN KERTAS POSISI DALAM<br>PERTEMUAN KERJA SAMA LUAR NEGERI YANG DISUSUN ..... | 57 |
| TABEL 25 KERTAS POSISI DJPRL .....                                                                                  | 58 |
| TABEL 26 CAPAIAN IK PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PELAYANAN<br>PUBLIK PADA TRIWULAN III TAHUN 2025.....              | 64 |
| TABEL 27 CAPAIAN IK NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DJPRL .....                                                  | 67 |
| TABEL 28 CAPAIAN IK PERSENTASE PENYELESAIAN INSTRUMEN HUKUM<br>PENATAAN RUANG LAUT .....                            | 69 |
| TABEL 29 CAPAIAN IK NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DJPRL..                                                     | 74 |
| TABEL 30 CAPAIAN IK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ<br>YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP DJPRL .....                  | 76 |
| TABEL 31 REALISASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG KINERJA SETDITJEN<br>PRL PER UNIT KERJA DI LINGKUP SETDITJEN PRL .....   | 78 |
| TABEL 32 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA .....                                                         | 80 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Setditjen PRL Triwulan 1 Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Setditjen PRL sampai dengan triwulan pertama tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja Setditjen PRL tahun 2025.

### **1.2 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025.

### 1.3 ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, terbentuknya DJPRL sebagai unit kerja baru membawa implikasi pada penyusunan kembali indikator kinerja dan peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah berjalan, serta harmonisasi kebijakan antar unit kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dituangkan tentang peran strategis Ditjen PRL yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Setditjen PRL berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan DJPRL guna mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB). Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional.

### 1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;

2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
7. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Susunan organisasi Setditjen PRL terdiri atas bagian umum, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan umum pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### 1.4 Sumber Daya Manusia Setditjen PRL

Unit Kerja Setditjen PRL terdiri dari Kepala Bagian Umum dan para Ketua Tim Kerja serta Staf Pelaksana. Jumlah pegawai di lingkup Setditjen PRL adalah 50 orang yang terdiri dari 39 ASN dan 11 PJLP.

**Tabel 1 Komposisi Pegawai di Setditjen PRL**

| No | Unit Kerja                   | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Sekretaris Ditjen PRL        |           | 1         | 1      |
| 2  | Tim Kerja Dukungan Manajemen | 9         | 5         | 14     |
| 3  | Tim Kerja Program            | 3         | 2         | 5      |
|    | Tim Kerja Keuangan           | 6         | 2         | 8      |
| 4  | Tim Kerja SDM                | 1         | 5         | 6      |

| No | Unit Kerja                    | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah    |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 5  | Tim Kerja Hukum dan Advokasi  | 2         | 2         | 4         |
| 6  | Tim Kerja Kerja Sama dan Data | 3         | 3         | 6         |
| 7  | Tim Kerja Hubungan Masyarakat | 2         | 5         | 6         |
|    | <b>Jumlah</b>                 | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>50</b> |

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tahun 205-2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, dan penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rancangan Renstra DJPRL 2025-2029**

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena menjadi periode awal dari RPJPN 2025-2045 dalam memulai agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk tahun 2025-2029, yang termuat dalam RPJMN 2025-2029, adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Sejalan dengan visi nasional tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai institusi yang membantu Presiden dalam bidang kelautan dan perikanan, juga memiliki visinya sendiri untuk periode 2025-2029. Visi KKP 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi:

- 1) Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- 2) Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
- 3) Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
- 4) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- 5) Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi

yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, terdiri dari:

- 1) SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut;
- 2) SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 3) SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- 4) SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
- 5) SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

DJPRL berkontribusi pada SS-2 “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan” yang akan dicapai dengan salah satu indikator kinerja yang merupakan tuisi DJPRL yakni “persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir” dan SS-5 “Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas”. SS-5 tersebut juga turun ke dalam SP DJPRL yakni “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut” yang didukung oleh indikator kinerja “Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL”. Indikator tersebut akan diampu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai unit organisasi level dua yang melaksanakan tugas pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Selain berwenang terhadap Indikator Kinerja tersebut, Setditjen PRL juga mendukung kinerja mandatory lingkup KKP yang meliputi:

- 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja
- 2) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK-RI
- 3) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP
- 4) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
- 6) Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP
- 7) Indeks Profesionalitas ASN
- 8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data
- 9) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
- 10) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP.

Seluruh indikator tersebut telah tertuang pada Indikator Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025-2029 dalam Rancangan Renstra DJPRL Tahun 2025-2029 sebagai berikut

**Tabel 2 Indikator Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025-2029 dalam Rancangan Renstra DJPRL Tahun 2025-2029**

| <b>SASARAN KEGIATAN</b>                                                              | <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> |                                                                                                                  | <b>TARGET 2025</b> | <b>TARGET 2029</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut | 1                                 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL                          | 80                 | 84                 |
|                                                                                      | 2                                 | Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL                                      | <0,5               | <0,5               |
|                                                                                      | 3                                 | Nilai Pembangunan Integritas DJPRL                                                                               | 0                  | 79                 |
|                                                                                      | 4                                 | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL                                                                              | 66                 | 80                 |
|                                                                                      | 5                                 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL                                                                     | 89                 | 91                 |
|                                                                                      | 6                                 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPRL                                                                         | 81,50              | 82,50              |
|                                                                                      | 7                                 | Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL                                                                   | 3.5                | 3.9                |
|                                                                                      | 8                                 | Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL                                                              | 0                  | 85                 |
|                                                                                      | 9                                 | Indeks Profesionalitas ASN DJPRL                                                                                 | 80                 | 84                 |
|                                                                                      | 10                                | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL                                                                         | 91                 | 91                 |
|                                                                                      | 11                                | Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL                                                                    | 0                  | 80                 |
|                                                                                      | 12                                | Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut | 0                  | 100                |
|                                                                                      | 13                                | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL                                                                        | 70                 | 80                 |
|                                                                                      | 14                                | Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL                                            | 76                 | 80                 |

Seluruh indikator kinerja (IK) ini merupakan indikator kinerja baru yang dirumuskan dalam rangka mendukung tujuan utama DJPRL sebagai unit kerja baru yang memiliki peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja sebelumnya (DJPRL). Oleh karena itu, terdapat beberapa IK yang tidak memiliki target pada tahun 2025 karena penyesuaian DJPRL sebagai unit kerja baru yakni

- 1) IK Nilai Pembangunan Integritas DJPRL tidak terdapat target pada tahun 2025 karena pada LKE Nilai Pembangunan Integritas terdapat poin perhitungan tertinggi yaitu Nilai WBK dari lingkup unit kerjanya yang telah memperoleh WBK atau WBBM. Sedangkan pada tahun 2025 per April Ditjen PRL belum memiliki UPT sehingga kemungkinan besar targetnya tidak akan tercapai. Selain itu, Direktorat (unit kerja pusat) sampai dengan sekarang masih dalam tahap membangun.
- 2) IK Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025 karena proses perubahan Tata Kerja dan Nomenklatur Ditjen PRL sebagai unit kerja yang baru.
- 3) IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL karena syarat utama inovasi pelayanan publik salah satunya adalah usia inovasi 2 tahun. Ditjen PRL memiliki beberapa inovasi namun semua usianya masih di bawah 2 tahun, sehingga proposal inovasinya tidak dapat dilakukan penilaian di tingkat KKP
- 4) IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri (Progsun) di Bidang Penataan Ruang Laut karena pada tahun 2025 Ditjen Penataan Ruang Laut merupakan organisasi baru dan belum mengusulkan Peraturan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengusulan progsun tersebut dilaksanakan pada T-1.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025

Penetapan kinerja tahun 2025 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di“cascading” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dokumen kinerja tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Penentuan IK pada PK 2025 sesuai dengan IK yang tercantum dalam Renstra 2025-2029 dan tambahan IK yang disesuaikan untuk mendukung kinerja pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada DJPRL, diluar mandatory yang ditetapkan oleh KKP yaitu:

1. Laporan SPIP yang disusun lingkup Setditjen PRL
2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL
3. Presentase Pelaksanaan Kerjasama bidang Penataan Ruang Laut
4. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan.

Adapun IK yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Setditjen PRL tertera pada Tabel 3 atau Lampiran 1.

**Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                      | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                     | TARGET |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.               | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut | 1                          | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)                                                         | 66     |
|                  |                                                                                      | 2                          | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL (Nilai)                                                 | 66     |
|                  |                                                                                      | 3                          | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL (Nilai)                                             | 81,5   |
|                  |                                                                                      | 4                          | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)                                         | 89     |
|                  |                                                                                      | 5                          | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)         | 80     |
|                  |                                                                                      | 6                          | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL (%) | 80     |
|                  |                                                                                      | 7                          | Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)                                              | 3,5    |
|                  |                                                                                      | 8                          | Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun (Dokumen)                                                   | 2      |
|                  |                                                                                      | 9                          | Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)                     | <0,5   |
|                  |                                                                                      | 10                         | Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)                                                           | 80     |
|                  |                                                                                      | 11                         | Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL (Indeks)                                                   | 80     |
|                  |                                                                                      | 12                         | Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)             | 100    |

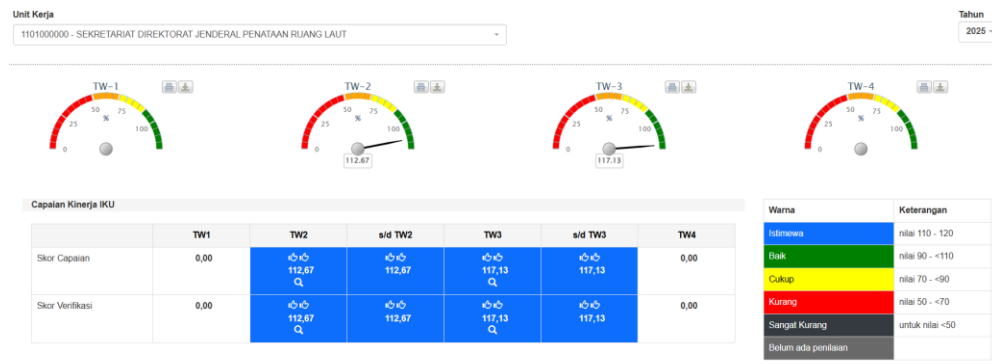
| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                            | TARGET |
|------------------|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |  | 13                         | Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)                                               | 91     |
|                  |  | 14                         | Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan (%)                | 100    |
|                  |  | 15                         | Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)                                          | 90     |
|                  |  | 16                         | Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (%) | 90     |
|                  |  | 17                         | Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik (%)                                          | 100    |
|                  |  | 18                         | Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)                                           | 91     |
|                  |  | 19                         | Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)                            | 100    |
|                  |  | 20                         | Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)                                          | 70     |
|                  |  | 21                         | Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%)                  | 76     |

Mayoritas IK tersebut merupakan IK baru setelah terbentuknya DJPRL sebagai unit kinerja baru. Namun, terdapat IK yang nilai dan perhitungannya menggunakan IK unit kerja lama (DJPRL) karena komponen penilaiannya masih terkait dengan DJPRL seperti DIPA dan berbagai dokumen kinerja. Adapun IK tersebut yakni

- 1) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL;
- 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL;
- 3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL;
- 4) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL;
- 5) Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL;
- 6) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PRL Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PRL terdapat 21 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2025 sebesar 117,13 (termasuk kriteria istimewa).



Sumber: [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)

**Gambar 1 Nilai Capaian Kinerja Setditjen Penataan Ruang Laut  
Triwulan III Tahun 2025**

Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 5 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian. Secara rinci, capaian masing-masing indikator kinerja Setditjen PRL Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Sasaran Kegiatan dan  
Indikator Kinerja Setditjen PRL Triwulan III Tahun 2025**

| Sasaran Kegiatan |                     | Indikator Kinerja Kegiatan |                                             | Target Tahunan | Triwulan III |         |               |
|------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------------|
|                  |                     |                            |                                             |                | Target       | Capaian | % (Kinerjaku) |
| 1.               | Terwujudnya Layanan | 1.                         | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai) | 66             | 66           | 88,94   | 120           |

| Sasaran Kegiatan                                                 |    | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                          |      | Target Tahunan | Triwulan III |         |               |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                  |    |                                                                                                     |      |                | Target       | Capaian | % (Kinerjaku) |
| Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut | 2. | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL (Nilai)                                                 | 66   | -              | -            | -       |               |
|                                                                  | 3. | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL (Nilai)                                             | 81,5 | -              | -            | -       |               |
|                                                                  | 4. | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)                                         | 89   | -              | -            | -       |               |
|                                                                  | 5. | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)         | 80   | 80             | 100          | 120     |               |
|                                                                  | 6. | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL (%) | 80   | 80             | 100          | 120     |               |
|                                                                  | 7. | Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)                                              | 3,5  | -              | -            | -       |               |
|                                                                  | 8. | Laporan SPIP Setditjen PRL                                                                          | 2    | 1              | 1            | 100     |               |

| Sasaran Kegiatan |  | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                  | Target Tahunan | Triwulan III |         |               |
|------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------------|
|                  |  |                                                                                             |                | Target       | Capaian | % (Kinerjaku) |
|                  |  | yang disusun (Dokumen)                                                                      |                |              |         |               |
|                  |  | 9. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)          | <0,5           | -            | -       | -             |
|                  |  | 10. Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)                                               | 80             | -            | -       | -             |
|                  |  | 11. Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL (Indeks)                                       | 80             | -            | -       | -             |
|                  |  | 12. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%) | 100            | -            | -       | -             |
|                  |  | 13. Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)                                            | 91             | -            | -       | -             |
|                  |  | 14. Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan (%)             | 100            | -            | -       | -             |
|                  |  | 15. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)                                       | 90             | -            | -       | -             |

| Sasaran Kegiatan |  | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                     | Target Tahunan | Triwulan III |         |               |
|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------------|
|                  |  |                                                                                                |                | Target       | Capaian | % (Kinerjaku) |
|                  |  | 16. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (%) | 90             | -            | -       | -             |
|                  |  | 17. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik (%)                                          | 100            | -            | -       | -             |
|                  |  | 18. Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)                                           | 91             | -            | -       | -             |
|                  |  | 19. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)                            | 100            | -            | -       | -             |
|                  |  | 20. Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)                                          | 70             | -            | -       | -             |
|                  |  | 21. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%)                  | 76             | 76           | 100     | 120           |

### **3.1 SK 1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut**

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PRL, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL; 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL; 3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL; 4) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL; 5) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL; 6) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL; 7) Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL; 8) Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun; 9) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL; 10) Indeks profesionalitas ASN DJPRL; 11) Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL; 12) Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan; 13) Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL; 14) Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan; 15) Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati; 16) Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun; 17) Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik; 18) Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL; 19) Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut; 20) Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL; dan 21) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL.

#### **IK 1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88

Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerja pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

**Tabel 5 Kategori Nilai PM SAKIP**

| Predikat | Nilai   | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA       | >90-100 | Sangat Memuaskan<br>Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.                                                                                                                                         |
| A        | >80-90  | Memuaskan<br>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.                                                                                                                                                                                |
| BB       | >70-80  | Sangat Baik<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. |

| Predikat | Nilai  | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B        | >60-70 | Baik<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. |
| CC       | >50-60 | Cukup<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.                                                                                                                    |
| C        | >30-50 | Kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.                                                                                                             |
| D        | 0-30   | Sangat Kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.                               |

Indikator ini diperoleh dari Penilaian Mandiri SAKIP DJPKRL sebagai unit kerja lama dari DJPRL. Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 6 Capaian IK Nilai PM SAKIP DJPRL**

|                |               |                                                                                             |                                            |                |                         |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  |               | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |                                            |                |                         |
| <b>IK – 1</b>  |               | <b>Nilai PM SAKIP DJPRL</b>                                                                 |                                            |                |                         |
| Tahun 2024     |               | Tahun 2025                                                                                  |                                            |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III | Capaian Tw III                                                                              | % Capaian                                  | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| <b>89,07</b>   | <b>66</b>     | <b>88,94</b>                                                                                | <b>134,75<br/>atau 120<br/>(kinerjaku)</b> | <b>66</b>      | <b>134,75</b>           |

**A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025**

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL pada tahun 2025 merupakan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPKRL karena sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 merupakan satu unit kerja yang sama. Capaian IK ini adalah 88,94 predikat A (Memuaskan) sesuai dengan Surat Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor

T.250/ITJ.1/HP.440/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. adapun target indikator kinerja ini sesuai dengan perjanjian kinerja adalah nilai sebesar 66 sehingga capaian pada tahun ini telah tercapai 134,76% (kinerjaku 120%).

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024**

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 (88,94) lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2024 (89,07) karena terdapat nilai komponen yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yakni pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hal tersebut dikarenakan reuiu laporan kinerja yang dilaksanakan setelah tanggal penyampaian laporan kinerja kepada pimpinan serta perbandingan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2024 lebih kecil dari tahun 2023.

**Tabel 7 Perbandingan Nilai AKIP DJPKRL Tahun 2024 dan Tahun 2025**

| No.                       | Komponen yang Dinilai                   | Bobot      | Nilai AKIP 2023 | Nilai AKIP 2025 |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1                         | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 26,51           | 27,71           |
| 2                         | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 27,41           | 27,60           |
| 3                         | Pelaporan Kinerja                       | 15         | 13,80           | <b>13,35</b>    |
| 4                         | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 21,34           | <b>20,28</b>    |
| <b>Nilai AKIP</b>         |                                         | <b>100</b> | <b>89,07</b>    | <b>88,94</b>    |
| <b>Predikat Penilaian</b> |                                         | <b>A</b>   | <b>A</b>        | <b>A</b>        |

**C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan**

Capaian IK pada triwulan III belum dapat dilakukan perbandingan dengan target tahunan karena periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan.

**D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

- Keberhasilan dalam pencapaian target IK ini didukung oleh komitmen pimpinan dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, kontribusi seluruh Tim Pengelola kinerja yang berkompeten dan telah mengikuti *elearning* SAKIP, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengimplementasian SAKIP.

- Adapun kendala yang dihadapi yaitu DJPRL merupakan unit kerja yang baru didirikan dan belum melengkapi sebagian dokumen kinerja yang dijadikan bahan penilaian AKIP. Selain itu, keterbatasan SDM juga menjadi hambatan dalam optimalisasi pelaksanaan kinerja di lingkup DJPRL.
- Solusi yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja yaitu menyusun dokumen perencanaan jangka menengah dan pemantauan berkala terhadap pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan.

#### E. Kegiatan Pendukung

1. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan II Tahun 2025
2. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025
3. Finalisasi Dokumen Kinerja Lingkup DJPRL Tahun 2025
4. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025
5. Penyusunan Teknokratik Renstra DJPRL 2025 – 2029.

#### F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

1. Penilaian Mandiri SAKIP Level 2 di Lingkup DJPRL
2. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2025
3. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025
4. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025
2. Penyusunan Teknokratik Renstra DJPRL 2025 – 2029.

## **IK 2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN

dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerjajaku pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

**Tabel 8 Kategori Nilai PM SAKIP**

| Predikat | Nilai   | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA       | >90-100 | Sangat Memuaskan<br>Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.                                                                                                                                         |
| A        | >80-90  | Memuaskan<br>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.                                                                                                                                                                                |
| BB       | >70-80  | Sangat Baik<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. |

| Predikat | Nilai  | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B        | >60-70 | Baik<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. |
| CC       | >50-60 | Cukup<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.                                                                                                                    |
| C        | >30-50 | Kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.                                                                                                             |
| D        | 0-30   | Sangat Kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.                               |

Indikator ini diperoleh dari Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PKRL sebagai unit kerja lama dari DJPRL. Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 9 Capaian IK Nilai PM SAKIP Setditjen PRL**

|                |                                                                                             |                |           |                |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |                |           |                |                         |
| <b>IK – 2</b>  | <b>Nilai PM SAKIP Setditjen PRL</b>                                                         |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                                  |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                               | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                           | -              | <b>66</b> | -              | -                       |

**A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025**

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Sampai dengan saat ini telah dilakukan PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL yang hasil penilaian tersebut akan ditetapkan pada Triwulan IV Tahun 2025 untuk menjadi acuan capaian Indikator Kinerja pada Level 2 Lingkup DJPRL.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024  
Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 Setditjen PRL merupakan unit kerja baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan  
Capaian IK pada triwulan III belum dapat dilakukan perbandingan dengan target tahunan karena periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi  
Adapun kendala yang dihadapi yaitu Setditjen PRL merupakan unit kerja yang baru didirikan, dan belum melengkapi sebagian dokumen kinerja yang dijadikan bahan penilaian PM SAKIP. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pemantauan berkala terhadap pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan.
- E. Kegiatan Pendukung
1. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan II Tahun 2025
  2. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025
  3. Finalisasi Dokumen Kinerja Lingkup DJPRL Tahun 2025
  4. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025
  5. Penyusunan Teknokratik Renstra DJPRL 2025 – 2029.
- E. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025
1. Pleno Penilaian Mandiri SAKIP Level 2 di Lingkup DJPRL
  2. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2025
  3. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025
  4. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025
  5. Penyusunan Teknokratik Renstra DJPRL 2025 – 2029.

### **IK 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran

melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target NKPA DJPRL Tahun 2025 sebesar 81,50. Capaian NKPA DJPRL nantinya diperoleh dari NKPA DJPKRL Tahun 2025 karena DJPRL masih menggunakan DIPA lama (DIPA DJPKRL).

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50

Formula Perhitungan:

NKPA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

| Variabel         | Uraian                            | Bobot |
|------------------|-----------------------------------|-------|
| Efektivitas (75) | Capaian Indikator Kinerja Program | 30    |
|                  | Nilai Efektivitas Satker          | 45    |
| Efisiensi (25)   | Nilai Efisiensi Satker            | 25    |

#### a. Efektifitas

##### 1. Capaian Indikator Kinerja Program

CIKP=

$$\left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{RIKPi}{TIKPi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan:

- CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L  
 RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i  
 TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

## 2. Nilai Efektifitas Satker

Nef Satker =

$$\left( \sum_{i=1}^n \frac{RVROi}{TVROi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

Nef Satker : Nilai Efektivitas Satker  
RVROi : Realisasi Volume RO i  
TVROi : Target Volume RO i  
n : Jumlah RO seluruh Satker

### b. Efisiensi

NE Satker = (40% X Penggunaan SBK) + (60% X Efisiensi SBK)

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$NKA\ UEI = (CIKP \times WCIKP) + (NEfsatker \times WNEfsatker) + (NESatker \times WNESatker)$

Keterangan:

NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I  
CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program  
NEfsatker : Nilai Efektivitas Satker  
NESatker : Nilai Efisiensi Satker  
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program  
WNEfsatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker  
WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Indikator ini diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL karena DIPA DJPRL masih menggunakan DIPA lama atau DIPA DJPKRL. Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 10 Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL**

|                |                                                                                             |                |              |                |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |                |              |                |                         |
| <b>IK – 3</b>  | <b>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL</b>                                      |                |              |                |                         |
| 2024           | 2025                                                                                        |                |              |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                               | Capaian Tw III | % Capaian    | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                           | -              | <b>81,65</b> | -              | -                       |

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025  
IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Namun demikian, telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung yakni pelaksanaan kegiatan sebagai implemementasi untuk mencapai target kegiatan dan penyerapan anggaran.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024  
Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan  
Capaian IK pada triwulan III belum dapat dilakukan perbandingan dengan target tahunan karena periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi  
DJPRL merupakan Eselon I baru yang DIPA efektifnya masih menggunakan DIPA Eselon I lama (DJPKRL) sehingga semua proses yang terkait dengan dokumen anggaran harus melibatkan Eselon I lain seperti pada proses revisi anggaran, pengusulan penggunaan PNB. Pemecahan DIPA belum bisa dilakukan karena berpotensi menghambat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Selain itu, terdapat kendala anggaran kegiatan yang terblokir sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Solusi yang dapat dilakukan adalah memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan secara konsisten melakukan pemantauan atas nilai kinerja perencanaan anggaran.
- E. Kegiatan Pendukung  
Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah
1. Penelahaan Pagu Anggaran Tahun 2025 Ditjen PRL
  2. Pengusulan Penggunaan PNB 13%
  3. reuiu rekomposisi penggunaan anggaran PNB tahun 2025
  4. Penginputan data capaian output pada aplikasi SAKTI.
- F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025  
Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan pemantauan NKPA DJPKRL Tahun 2025.

#### IK 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan:

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Sedangkan, konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

| No | Uraian Indikator IKPA  | Bobot (%)              |
|----|------------------------|------------------------|
| 1  | Revisi DIPA            | 10                     |
| 2  | Deviasi RPD            | 15                     |
| 3  | Penyerapan Anggaran    | 20                     |
| 4  | Belanja Kontraktual    | 10                     |
| 5  | Penyelesaian Tagihan   | 10                     |
| 6  | Pengelolaan UP dan TUP | 10                     |
| 7  | Dispensasi SPM         | (Pengurang Nilai IKPA) |
| 8  | Capaian Output         | 25                     |

Target IKPA DJPRL Tahun 2025 sebesar 85. Capaian IKPA DJPRL nantinya diperoleh dari IKPA DJPKRL Tahun 2025 karena DJPRL masih menggunakan DIPA lama (DIPA DJPKRL).

Indikator ini diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL karena DIPA DJPRL masih menggunakan DIPA lama atau DIPA DJPKRL. Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan III Tahun 2025

**Tabel 11 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL**

|                |                                                                                             |                |           |                |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |                |           |                |                         |
| <b>IK – 4</b>  | <b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL</b>                            |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                                  |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                               | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                           | -              | <b>92</b> | -              | -                       |

**A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025**

Frekuensi pengukuran IKU ini dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Namun, berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan periode triwulan III atas capaian IKPA DJPKRL melalui aplikasi SPAN modul Monev PA adalah sebesar 84,59 (Baik), dengan rincian dengan rincian nilai kualitas perencanaan 84,61, kualitas pelaksanaan 85,44, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran 100. Nilai Komponen Deviasi halaman III DIPA masih rendah karena *gap* antar target dan realisasi yang masih jauh. Begitu juga dengan realisasi anggaran yang belum optimal dikarenakan adanya blokir anggaran untuk kebijakan efisiensi anggaran dan beberapa kontrak yang baru akan terealisasi di Triwulan IV Tahun 2025.

**Tabel 12 Nilai Sementara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL Triwulan III Tahun 2025**

| No                                       | Aspek Penilaian                     | Nilai | Bobot | Nilai Akhir | Nilai Aspek  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1.                                       | Kualitas Perencanaan Anggaran       |       |       |             | 84,61        |
|                                          | Revisi DIPA                         | 100   | 10    | 10          |              |
|                                          | Deviasi Halaman III DIPA            | 77,24 | 15    | 10,38       |              |
| 2.                                       | Kualitas Pelaksanaan Anggaran       |       |       |             | 85,44        |
|                                          | Penyerapan Anggaran                 | 70,73 | 20    | 10,78       |              |
|                                          | Belanja Kontraktual                 | 100   | 10    | 10          |              |
|                                          | Penyelesaian Tagihan                | 100   | 10    | 10          |              |
|                                          | Pengelolaan UP TUP                  | 98    | 10    | 8,79        |              |
| 3.                                       | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran |       |       |             | 100          |
|                                          | Capaian Output                      | 100   | 25    | 25          |              |
| Nilai Total                              |                                     |       |       |             | 84,59        |
| Konversi Bobot                           |                                     |       |       |             | 100          |
| Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |                                     |       |       |             | <b>84,59</b> |

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

IKPA DJPKRL pada Triwulan III Tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukurannya secara semesteran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian IK pada triwulan III belum dapat dilakukan perbandingan dengan target tahunan karena periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Adapun kendala yang dihadapi yaitu DJPRL belum memiliki Dokumen Anggaran tersendiri, dikarenakan masih menyatu dengan DJPK, dimana sebelumnya merupakan satu unit organisasi DJPKRL. Solusi yang telah dilakukan adalah pembagian alokasi anggaran secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, penunjukan PPK telah terpisah antara DJPRL dan DJPK.

E. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan:

1. Revisi DIPA dan RKAKL
2. Penyusunan dan penyampaian rencana penarikan dana
3. Penyampaian data kontrak
4. Pengelolaan UP dan TUP
5. Konfirmasi capaian output melalui aplikasi SAKTI

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

1. Menyusun kembali RPD per jenis belanja dan menyeleraskannya dengan target penyerapan
2. Memastikan deviasi antara pelaksanaan dgn rencana tidak melebihi 5%
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan guna memastikan capaian kinerja sesuai target IKPA dan indikator output
4. Melakukan rekonsiliasi data keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara laporan keuangan dan kondisi fisik
5. Penyelesaian data kontrak sebelum batas waktu yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan sesuai PER-17/PB/2025
6. Pengelolaan UP dan TUP
7. Penyampaian capaian output melalui aplikasi SAKTI tepat waktu.

## IK 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL

Definisi rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPRL sampai dengan waktu pengukuran.

Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Frekuensi pengukuran IKU ini dilakukan secara triwulanan.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini

**Tabel 13 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL**

|                |                                                                                                |                                   |           |                |                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b>    |                                   |           |                |                         |
| <b>IK – 5</b>  | <b>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL</b> |                                   |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                                     |                                   |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                                  | Capaian Tw III                    | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| <b>80</b>      | <b>100</b>                                                                                     | <b>125 atau 120 (% Kinerjaku)</b> | <b>80</b> | <b>125</b>     | <b>80</b>               |

### A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL pada triwulan III tahun 2025 ini adalah 100% dari target 80% atau tercapai 125% (kinerjaku 120%) sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 944/ITJ.0/RC.610/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" periode Triwulan III Tahun 2025.

Capaian ini diperoleh dari hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode 1 oktober 2024 s.d 30 September 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (21 rekomendasi) oleh DJPRL sampai dengan 30 September 2025.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024  
Capaian Kinerja Pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan  
Capaian indikator kinerja ini pada periode triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 100% sedangkan target tahun 2025 adalah sebesar 80%, sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 125% (kinerjaku120%).
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
Faktor Pendukung dalam pencapaian target kinerja yaitu Komitmen Pimpinan dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan dalam pencapaian indikator kinerja ini belum terdapat kendala, sehingga belum ada solusi yang dapat dilakukan.
- E. Kegiatan Pendukung  
Kegiatan Pendukung yang telah dilaksanakan guna mencapai target indikator kinerja ini yaitu telah dilakukan pembahasan tindak lanjut temuan ltjen sampai dengan triwulan III tahun 2025.
- F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025  
Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PRL, Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PRL, serta memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

#### **IK 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Setditjen PRL sampai dengan waktu pengukuran.

Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Berikut capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL pada Triwulan III Tahun 2025.

**Tabel 14 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL**

|                |                                                                                                        |                                   |           |                |                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b>            |                                   |           |                |                         |
| <b>IK – 6</b>  | <b>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL</b> |                                   |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                                             |                                   |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                                          | Capaian Tw III                    | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| <b>80</b>      | <b>100</b>                                                                                             | <b>125 atau 120 (% Kinerjaku)</b> | <b>80</b> | <b>125</b>     | <b>80</b>               |

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025  
 Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL pada periode triwulan III tahun 2025 ini adalah sebesar 100% dari target 80% atau tercapai 125% (kinerjaku 120%) sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PRL Nomor 944/ITJ.0/RC.610/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Level II Lingkup DJPRL" periode Triwulan III Tahun 2025. Capaian ini diperoleh dari hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode 1 oktober 2024 s.d 30 September 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (1 rekomendasi) oleh DJPRL sampai dengan 30 September 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024  
 Capaian Kinerja Pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan  
 Capaian indikator kinerja ini pada periode triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 100% sedangkan target tahun 2025 adalah sebesar 80%, sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 125% (kinerjaku 120%).

- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja yaitu Komitmen Pimpinan dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan dan koordinasi berkala penanggungjawab kegiatan dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi. Dalam pencapaian indikator kinerja ini belum terdapat kendala, sehingga belum ada solusi yang dapat dilakukan.
- E. Kegiatan Pendukung  
Kegiatan Pendukung yang telah dilaksanakan guna mencapai target indikator kinerja ini yaitu telah dilakukan pembahasan tindak lanjut temuan BPK dan Itjen sampai dengan triwulan III tahun 2025.
- F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025  
Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PRL, Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PRL, serta memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

#### **IK 7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL**

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai akan disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

| LEVEL MATURITAS |                       | INTERVAL SKOR                                            |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1               | Rintisan              | 1,0 s/d kurang dari 2,0 ( $1,0 \leq \text{skor} < 2,0$ ) |
| 2               | Berkembang            | 2,0 s/d kurang dari 3,0 ( $2,0 \leq \text{skor} < 3,0$ ) |
| 3               | Terdefinisi           | 3,0 s/d kurang dari 4,0 ( $3,0 \leq \text{skor} < 4,0$ ) |
| 4               | Terkelola dan Terukur | 4,0 s/d kurang dari 4,5 ( $4,0 \leq \text{skor} < 4,5$ ) |
| 5               | Optimum               | Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ( $4,5 \leq \text{skor} \leq 5$ ) |

Formula Perhitungan:

- Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP.
- Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas:
  - Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I
  - Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan III Tahun 2025

**Tabel 15 Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL**

|                |               |                                                                                             |            |                |                         |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  |               | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |            |                |                         |
| <b>IK – 7</b>  |               | <b>Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL</b>                                       |            |                |                         |
| Tahun 2024     |               | Tahun 2025                                                                                  |            |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III | Capaian Tw III                                                                              | % Capaian  | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -             | -                                                                                           | <b>3,5</b> | -              | -                       |

- Capaian IK Triwulan III Tahun 2025  
IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Sampai dengan saat ini masih dalam persiapan penilaian Maturitas SPIP.
- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024  
Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan  
Capaian kinerja triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan.
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi  
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator ini.

Belum terdapat analisa faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja, sedangkan untuk kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tidak ada, sehingga belum terdapat solusi untuk perbaikan kinerja yang dapat diberikan.

E. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan

1. Pembahasan Rancangan Surat Keputusan Tim SPIP Ditjen PRL Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2025
2. Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Resiko
3. Penyampaian dan Pembahasan Hasil Asistensi MR tahun 2026 oleh Inspektorat Jenderal.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan

1. Bimbingan Teknis penyusunan Manajemen Risiko tahun 2025
2. Penyusunan Laporan triwulan dan bulanan
3. Evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP.

## **IK 8. Laporan SPIP Setditjen PRL yang Disusun**

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Hal ini menjadi amanah sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Teknik Menghitung IK ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP pada periode Triwulan II s.d. Triwulan III Tahun 2025.

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan III Tahun 2025

**Tabel 16 Capaian IK Laporan SPIP Setditjen PRL yang Disusun**

|                |                                                                                             |                |           |                |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |                |           |                |                         |
| <b>IK – 8</b>  | <b>Laporan SPIP Setditjen PRL yang Disusun</b>                                              |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                                  |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                               | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | 1                                                                                           | 1              | 100       | 2              | 50                      |

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025  
Capaian indikator kinerja Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun pada periode triwulan III tahun 2025 ini adalah sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen atau tercapai 100% sesuai dengan Laporan SPIP triwulan II Tahun 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tanggal 18 Juli 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024  
Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan  
Capaian indikator kinerja Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun periode triwulan III tahun 2025 ini adalah sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen atau tercapai 100%.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi  
Tidak ada kendala khusus dalam pencapaian IK ini karena baru dimulai pada Triwulan III 2025.
- E. Kegiatan Pendukung  
Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan Penetapan Tim SPIP dan Penyusunan Laporan SPIP DJPRL Triwulan II Tahun 2025.
- F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025  
Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan
1. Bimbingan Teknis penyusunan Manajemen Risiko tahun 2025
  2. Penyusunan Laporan triwulan dan bulanan
  3. Evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP.

## IK 9. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024.

Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2024}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2024}} \times 100\%$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan III Tahun 2025

**Tabel 17 Capaian IK Batas tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL pada Triwulan III Tahun 2025**

|                |                                                                                             |                |           |                |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |                |           |                |                         |
| <b>IK – 9</b>  | <b>Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL</b>          |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                                  |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                               | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                           | -              | -         | <0,5           | -                       |

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025  
Pengukuran capaian indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan III tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024  
Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 karena IK ini dihitung secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan target Tahunan  
Capaian indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL triwulan III dengan target tahunan

belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan.

**D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

Keberhasilan indikator diperlukan dukungan atau komitmen unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa SDM dalam menyelesaikan TLHP BPK RI sudah cukup memadai dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

**E. Kegiatan Pendukung**

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah pembahasan tindak lanjut temuan BPK sampai dengan triwulan III tahun 2025.

**F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025**

Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas sisa temuan yang belum tuntas dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan dan memadai.

## **IK 10. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

$IP_i$  = Indeks Profesionalisme ke-i

$IP_1$  = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

$IP_2$  = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

$IP_3$  = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

$IP_4$  = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$  = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$  = Bobot indikator Kualifikasi ke-k \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$  = Bobot indikator Kualifikasi ke-l \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$  = Bobot indikator Kualifikasi ke-m \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Capaian IK Triwulan III Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 18 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPRL**

|                |               |                                                                                      |           |                |                         |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| SK – 1         |               | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut |           |                |                         |
| IK – 10        |               | Indeks Profesionalitas ASN DJPRL                                                     |           |                |                         |
| 2024           |               | 2025                                                                                 |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III | Capaian Tw III                                                                       | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -             | -                                                                                    | -         | 80             | -                       |

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Pengukuran capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN DJPRL merupakan target semesteran, sehingga pada periode triwulan III tahun 2025 ini tidak dapat dilakukan pengukuran, perkembangan capaian IP ASN DJPRL hingga saat ini adalah sebesar 82,49 dengan kategori Tinggi, yang dapat dilihat pada tautan berikut: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/eselon>

IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerj

Cari

| No | Unit Kerja                                                                   | Jumlah Pegawai Yang Dihitung | Kualifikasi (bobot 25) |            | Kompetensi (bobot 40) |            | Kinerja (bobot 30) |            | Disiplin (bobot 5) |            | TOTAL | Keterangan |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------|------------|
|    |                                                                              |                              | IP                     | Prosentase | IP                    | Prosentase | IP                 | Prosentase | IP                 | Prosentase |       |            |
| 1  | SEKRETARIAT JENDERAL                                                         | 566                          | 22.55                  | 90.2 %     | 32.13                 | 80.33 %    | 25.48              | 84.93 %    | 5                  | 100 %      | 85.16 | TINGGI     |
| 2  | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT                                      | 127                          | 22.99                  | 91.96 %    | 29.85                 | 74.63 %    | 24.65              | 82.17 %    | 5                  | 100 %      | 82.49 | TINGGI     |
| 3  | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN                                     | 598                          | 22.43                  | 89.72 %    | 31.66                 | 79.15 %    | 25.72              | 85.73 %    | 4.99               | 99.8 %     | 84.81 | TINGGI     |
| 4  | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP                                        | 1687                         | 22.47                  | 89.88 %    | 30.77                 | 76.92 %    | 25.31              | 84.37 %    | 4.99               | 99.8 %     | 83.54 | TINGGI     |
| 5  | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA                                      | 1247                         | 21.93                  | 87.72 %    | 29.88                 | 74.7 %     | 24.79              | 82.63 %    | 5                  | 100 %      | 81.61 | TINGGI     |
| 6  | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN       | 417                          | 23.27                  | 93.08 %    | 31.53                 | 78.83 %    | 24.48              | 81.6 %     | 5                  | 100 %      | 84.28 | TINGGI     |
| 7  | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 1533                         | 22.79                  | 91.16 %    | 30.4                  | 76 %       | 24.53              | 81.77 %    | 4.99               | 99.8 %     | 82.71 | TINGGI     |
| 8  | INSPEKTORAT JENDERAL                                                         | 205                          | 22.46                  | 89.84 %    | 32.18                 | 80.45 %    | 24.68              | 82.27 %    | 5                  | 100 %      | 84.33 | TINGGI     |
| 9  | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 5040                         | 22.45                  | 89.8 %     | 28.83                 | 72.08 %    | 24.51              | 81.7 %     | 4.99               | 99.8 %     | 80.78 | SEDANG     |
| 10 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN          | 942                          | 22.74                  | 90.86 %    | 30.8                  | 77 %       | 24.11              | 80.37 %    | 4.98               | 99.6 %     | 82.64 | TINGGI     |

**Gambar 2 Perkembangan IP ASN KKP September 2025**

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024  
Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan  
Capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN DJPRL triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah semesteran.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
Faktor Pendukung dalam pencapaian target kinerja yaitu Adanya MOOC (*Massive Open Online Course*) yang merupakan kursus daring (*online*) skala besar yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pegawai KKP melalui aplikasi e-milea (*electronic milenial learning*) yang dapat diakses pada tautan <https://elearning.kkp.go.id/> untuk pemenuhan diklat wajib 20 JP. Adapun kendala yang dihadapi yaitu belum seluruh pegawai lingkup DJPRL melakukan pembaruan diklat pada My ASN secara mandiri. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pemantauan capaian IP ASN.
- E. Kegiatan Pendukung  
Kegiatan Pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025

1. pelaksanaan Tugas Belajar
2. sebagian pegawai telah mengikuti seminar dan diklat 20 JP melalui MOOC.
3. peningkatan kinerja individu pegawai dengan pembagian peran hasil.
4. pemantauan atas kedisiplinan pegawai melalui e-presensi.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan

1. Penyusunan SKP Triwulan III Tahun 2025, Penggunaan Portal dan e-presensi KKP
2. Pemantauan Nilai IP ASN.

### IK 11. Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

$IP_i$  = Indeks Profesionalisme ke-i

$IP_1$  = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

$IP_2$  = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

$IP_3$  = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

$IP_4$  = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$$

$$W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$$

$$W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$$

$$W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$$

Capaian IK Triwulan III Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 19 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL**

| SK – 1         | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut |                |           |                |                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| IK – 11        | Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL                                             |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                           |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                        | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                    | -              | -         | 80             | -                       |

#### A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Pengukuran capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL merupakan target semesteran, sehingga pada periode triwulan III tahun 2025 ini tidak dapat dilakukan pengukuran, perkembangan capaian IP ASN Setditjen PRL hingga saat ini adalah sebesar 83,35 dengan kategori Tinggi, yang dapat dilihat pada tautan berikut : <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/131>



IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerj

Cari

| No | Unit Kerja                                                 | Jumlah Pegawai Yang Dihitung | Kualifikasi (bobot 25) |            | Kompetensi (bobot 40) |            | Kinerja (bobot 30) |            | Disiplin (bobot 5) |            | TOTAL | Keterangan |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------|------------|
|    |                                                            |                              | IP                     | Prosentase | IP                    | Prosentase | IP                 | Prosentase | IP                 | Prosentase |       |            |
| 1  | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT        | 40                           | 23.5                   | 94 %       | 29.98                 | 74.95 %    | 24.88              | 82.93 %    | 5                  | 100 %      | 83.35 | TINGGI     |
| 2  | DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN                      | 16                           | 22.5                   | 90 %       | 30.25                 | 75.63 %    | 24.69              | 82.3 %     | 5                  | 100 %      | 82.44 | TINGGI     |
| 3  | DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 16                           | 23.12                  | 92.48 %    | 30.42                 | 76.05 %    | 25.31              | 84.37 %    | 5                  | 100 %      | 83.86 | TINGGI     |
| 4  | DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT | 25                           | 22.6                   | 90.4 %     | 27.78                 | 69.45 %    | 22.8               | 76 %       | 5                  | 100 %      | 78.18 | SEDANG     |
| 5  | DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT                   | 14                           | 23.57                  | 94.28 %    | 29.93                 | 74.83 %    | 25.36              | 84.53 %    | 5                  | 100 %      | 83.86 | TINGGI     |
| 6  | DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFARTAN RUANG LAUT             | 14                           | 21.79                  | 87.16 %    | 32.73                 | 81.82 %    | 25.36              | 84.53 %    | 5                  | 100 %      | 84.88 | TINGGI     |

**Gambar 3 Perkembangan IP ASN DJPRL September 2025**

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024  
Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Tahunan  
Capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah semesteran.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
Faktor Pendukung dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya MOOC (*Massive Open Online Course*) yang merupakan kursus daring (*online*) skala besar yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pegawai KKP melalui aplikasi e-milea (*electronic milenial learning*) yang dapat diakses pada tautan <https://elearning.kkp.go.id/> untuk pemenuhan diklat wajib 20 JP. Adapun kendala yang dihadapi yaitu belum seluruh pegawai lingkup Setditjen PRL melakukan pembaruan diklat pada My ASN secara mandiri. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pemantauan capaian IP ASN.
- E. Kegiatan Pendukung
1. Kegiatan Pendukung yang telah dilaksanakan guna mencapai target indikator kinerja ini yaitu :
  2. Pelaksanaan Tugas Belajar
  3. Sebagian pegawai telah mengikuti seminar dan diklat 20 JP melalui MOOC.
  4. Peningkatan kinerja individu pegawai dengan pembagian peran hasil.
  5. Pemantauan atas kedisiplinan pegawai melalui epresensi.
  6. Updating Data Pegawai melalui aplikasi SIASN BKN dan Approval Data Diklat Pegawai Lingkup Ditjen PRL
  7. Approval Data Diklat pemenuhan Diklat 20 JP Pegawai pada IP ASN
  8. Pengusulan Pencantuman Gelar Pendidikan dan Vokasi Pegawai Lingkup Ditjen PRL.
- F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025  
Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan
1. Penyusunan SKP Triwulan III Tahun 2025, Penggunaan Portal dan e-presensi KKP
  2. Pemantauan Nilai IP ASN.

## **IK 12. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan**

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrument alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Dokumen RB adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan RB General dan RB Tematik di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Dokumen RB terdiri dari:

- 1) Dokumen rencana kerja RB general
- 2) Dokumen rencana kerja RB Tematik
- 3) Dokumen monitoring RB General
- 4) Dokumen monitoring RB Tematik.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{jumlah dokumen RB yang diselesaikan}}{\text{jumlah dokumen RB yang ditentukan}} \times 100\%$$

Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Reformasi Birokrasi General dan Dimensi Reformasi Birokrasi Tematik. Indikator capaian pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi terdiri dari:

### Reformasi Birokrasi General

| No. | Indikator                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi                              |
| 2   | Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi                |
| 3   | Indeks SPBE                                                                |
| 4   | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE                             |
| 5   | Indeks Perencanaan Pembangunan                                             |
| 6   | Nilai SAKIP                                                                |
| 7   | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas                           |
| 8   | Tingkat Maturitas SPIP                                                     |
| 9   | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan |
| 10  | Survei Penilaian Integritas (SPI)                                          |
| 11  | Indeks Kualitas Kebijakan                                                  |
| 12  | Indeks Reformasi Hukum                                                     |
| 13  | Tingkat Digitalisasi Arsip                                                 |
| 14  | Indeks Pembangunan Statistik (IPS)                                         |
| 15  | Indeks Tata Kelola Pengadaan                                               |
| 16  | Opini BPK                                                                  |
| 17  | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK                                              |
| 18  | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                     |
| 19  | Indeks Pengelolaan Aset                                                    |
| 20  | Indeks Sistem Merit                                                        |
| 21  | Indeks BerAKHLAK                                                           |
| 22  | Survei Kepuasan Masyarakat                                                 |
| 23  | Indeks Pelayanan Publik                                                    |

| No. | Indikator                                  |
|-----|--------------------------------------------|
| 24  | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik |

### Reformasi Birokrasi Tematik

| No. | Indikator                                          |
|-----|----------------------------------------------------|
| 1   | Pengentasan Kemiskinan: Nilai Tukar Petambak Garam |

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan III Tahun 2025

**Tabel 20 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan**

|                |                                                                                      |                |           |                |                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| SK – 1         | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut |                |           |                |                         |
| IK – 12        | Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan  |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                           |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                        | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                    | -              | -         | 100            | -                       |

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025  
 IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Namun, telah dilakukan pembahasan penyesuaian Rencana Aksi RB KKP Tahun 2025 berdasarkan SE Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 Lingkup Ditjen PRL.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024  
 Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan  
 Capaian indikator kinerja Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah Tahunan.

- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2025 telah dilakukan oleh masing-masing penanggungjawab pada Eselon II sebagaimana dokumen RB yang telah terpenuhi sehingga tidak terdapat kendala pada pencapaian kinerja ini.
- E. Kegiatan Pendukung  
Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan
1. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025
  2. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025
  3. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2025
  4. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025.
- F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025  
Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan
1. Pemantauan Capaian Rencana Aksi RB pada Triwulan III Tahun 2025; dan
  2. Penyiapan data dukung Capaian Rencana Aksi RB pada Triwulan III Tahun 2025.

### **IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL**

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan di laman satu data KKP. Secara umum parameter penilaian tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan yang termasuk ke dalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh mencakup 3 (tiga) variabel perhitungan, yaitu:

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (X1), Bobot Nilai 30%.
2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%.

Namun demikian, di lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tidak memiliki indikator jumlah pelaku usaha KP dan data produksi KP, sehingga yang dihitung sebagai indikator hanya realisasi data geospasial yang terintegrasi. Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi lingkup

DJPRL diukur dari capaian tingkat kematangan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Peta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ-KAW).

Target capaian Data Geospasial lingkup DJPRL tahun 2025 adalah sebagai berikut:

| No | Nama IGT                                        | Tingkat Kematangan Eksisting | Target |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| 1  | Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut | 3                            | 4      |
| 2  | Peta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah       | 3                            | 4      |

Terdapat 5 (lima) ukuran tingkat kematangan data geospasial DJPRL yang Terjamin dengan bobotnya, yaitu:

- 1) Tingkat Kematangan 1 : Telah dilakukan perencanaan dan rapat koordinasi
- 2) Tingkat Kematangan 2 : Telah dilakukan pengumpulan data
- 3) Tingkat Kematangan 3 : Telah dilakukan produksi peta/pengolahan data yang terstandar
- 4) Tingkat Kematangan 4 : Telah dilakukan kontrol dan evaluasi kualitas
- 5) Tingkat Kematangan 5 : Telah dilakukan penjaminan kualitas dan penyebarluasan/ berbagi pakai

Formula Perhitungan: **Persentase TKPD: X1 + X2 + X3**

Adapun kriteria penilaiannya adalah :

Nilai TKPD 0 % - 25,9 % (tidak patuh)

Nilai TKPD 26 % - 50,9 % (cukup patuh)

Nilai TKPD 51 % - 75,9 % (patuh)

Nilai TKPD 76 % - 100 % (sangat patuh)

Rumus Variabel Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1):

$$\sum KUSUKA = \left( \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid, Terdaftar, Termutakhirkan}}{\text{Total Target}} \right) \times 100$$

Rumus Variabel Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X<sub>2</sub>):

$$X = \left( \frac{\text{Realisasi jumlah sampling yang divalidasi}}{\text{Jumlah data sampling produksi garam yang diinput}} \right)$$

Rumus Variabel Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi ( $X_3$ )

$$\text{Nilai per eselon 1} = \left( \frac{\text{jumlah rencana aksi yang diselesaikan}}{\text{total kegiatan berdasarkan rencana aksi}} \right) \times 100$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan III Tahun 2025

**Tabel 21 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL**

|                |                                                                                             |                |           |                |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |                |           |                |                         |
| <b>IK – 13</b> | <b>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL</b>                                             |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                                  |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                               | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                           | -              | -         | <b>91</b>      | -                       |

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025  
Tidak ada capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 karena IK ini dihitung secara tahunan. Namun, sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan Pembahasan IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data lingkup KKP yang diselenggarakan oleh Pusdatin.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024  
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan  
Capaian indikator kinerja Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah Tahunan.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan  
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini.
- E. Kegiatan Pendukung
  1. Pembahasan IKU TKPD
  2. Pembahasan IGT Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut/ KKPRL
  3. Pembahasan Publikasi RTRWP Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Portal Data KKP
  4. Pembinaan IGT oleh BIG - Pendampingan Manajemen Kualitas

5. Rakornas IG Tahun 2025
6. Pembinaan IGT oleh BIG - Pendampingan Penyusunan dan Pemutakhiran Spesifikasi Produk Data (SPD)
7. Koordinasi Kompilasi dan Integrasi IGT yang merupakan program Prioritas Nasional 2025-2029
8. Koordinasi Data IGT BPSPL Serang - Wilker Semarang
9. Pembahasan IGT KSNT Cadangan Karbon Biru
10. Pembahasan Standar Data Informasi Geospasial Tematik lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
11. Pembahasan progres dan perbaikan Modul Satu Peta Portal Data Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. Pembinaan IGT oleh BIG - Pendampingan Penyusunan Spesifikasi Produk Data (SPD) dan Manajemen Kualitas IGT
13. Koordinasi Penjaminan Kualitas IGT Materi Teknis Perairan Pesisir Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (KKPRL RTRWP)
14. Penyampaian Hasil Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas Informasi Geospasial KKPRL RTRWP
15. Sosialisasi Standar Informasi Geospasial.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan kontrol kualitas dan evaluasi kualitas IGT KKPRL dan IGT RZKAW.

#### **IK 14. Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan**

Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut adalah dokumen yang berisi kumpulan data terkait lingkup tugas dan fungsi DJPRL. Dokumen ini disusun dan dikumpulkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Komponen Utama:

1. Buku DJPRL Dalam Angka: Dokumen tahunan yang menyajikan data statistik terkait kegiatan dan capaian DJPRL. Berfungsi sebagai sumber informasi kuantitatif untuk evaluasi dan perencanaan.
2. Buku Album Peta RZ-KAW: Dokumen visual yang memuat peta – peta terkait Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ-KAW). Menyediakan representasi spasial untuk mendukung perencanaan dan pengawasan.

Target:

Penyusunan dan penerbitan 2 (dua) dokumen utama DJPRL dalam satu tahun anggaran yakni Buku DJPRL Dalam Angka dan Buku Album Peta RZ-KAW.

Formula Perhitungan:

$$\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Jumlah dokumen yang disusun dan diterbitkan}}{\text{Target dokumen tahunan}} \right) \times 100\%$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan III Tahun 2025

**Tabel 22 Capaian IK Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan**

|                |                                                                                             |                |           |                |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |                |           |                |                         |
| <b>IK – 14</b> | <b>Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan</b>              |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                                  |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                               | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                           | -              | -         | 100            | -                       |

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025 dan merupakan IK baru pada Triwulan III Tahun 2025. Namun, sampai dengan saat ini telah dilakukan koordinasi dengan DJPK terkait Penyusunan KPDA DJPKRL Tahun 2024.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

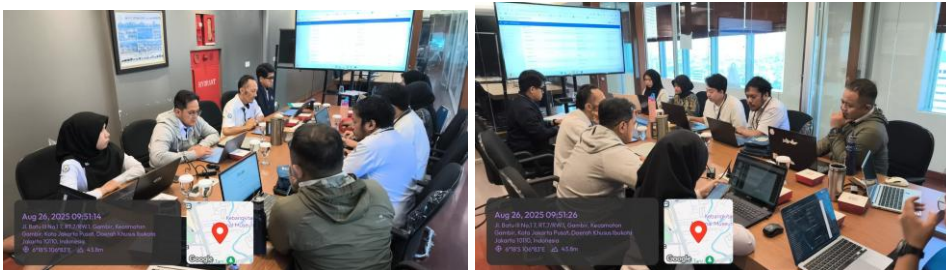
Capaian indikator kinerja Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini.

#### E. Kegiatan Pendukung

1. Rapat Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024-2030
2. Identifikasi Data Utama lingkup DJPK dan DJPRL Tahun 2025 (9 jul)
3. Rapat Koordinasi dan Identifikasi Ketersediaan Data dalam rangka Penyusunan Ocean Satellite Accounts/ OSA
4. Rapat Pemenuhan Dokumen PUG Es. I lingkup KKP Semester I Tahun 2025
5. Pengembangan Sistem Informasi DJPRL
6. Pembahasan Rancangan Kepmen KP tentang Data Utama lingkup KKP
7. Penyusunan Laporan Nasional Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-7/ NATREP 7
8. Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2024 (Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2025)
9. Sosialisasi Penjelasan Pengisian Matriks Evaluasi PUG 2024 oleh Kemen PP/PA
10. Rapat Finalisasi Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Data Utama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



**Gambar 4 Kegiatan Koordinasi Penjaminan Kulaitas IGT Materi Teknis Perairan Pesisir pada RTRWP**



**Gambar 5 Rapat Identifikasi Data Utama lingkup DJPRL dan Pembahasan OMS LAUTRA**

#### F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan finalisasi Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2024 dan finalisasi Album Peta DJPRL.

### **IK 15. Presentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati**

Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh KKP dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja KKP. Pelaksanaan kerja sama di lingkungan KKP berpedoman pada Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- 1) Mengutamakan kepentingan nasional;
- 2) Kejelasan tujuan dan hasil;
- 3) Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- 4) Saling menghargai dan menguntungkan;
- 5) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- 6) Tidak menimbulkan ketergantungan;
- 7) Terencana dan berkelanjutan;
- 8) Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- 9) Berbasis indikator, kinerja, efektif dan efisien; dan
- 10) Bersifat kelembagaan.

Pelaksanaan kerjasama bidang Penataan Ruang Laut meliputi kerjasama nasional dan internasional. Kerja Sama nasional meliputi kerja sama yang dilakukan DJPRL dengan Kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah. Kerja sama internasional meliputi kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara asing, organisasi internasional pemerintah, organisasi internasional non pemerintah, dan organisasi/lembaga asing. Untuk mencapai sasaran dan target program Penataan Ruang Laut, DJPRL memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak di dalam negeri seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun kelompok masyarakat. Penguatan dukungan dalam berbagai bentuk kerja sama dari luar negeri tidak luput dari sasaran potensial mitra kerja sama dalam akselerasi pencapaian program Penataan Ruang Laut. Kerja sama luar negeri dapat dijalin melalui kerja sama bilateral, regional, multinasional, lembaga internasional di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Lembaga Donor, Non Government Organization (NGO) asing, maupun Organisasi Masyarakat Asing (Ormas Asing).

Formula Perhitungan:

Membandingkan antara jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani sampai dengan Desember 2025 dengan jumlah dokumen kerja sama yang

diusulkan periode April – Oktober 2025. Adapun penghitungannya dengan dengan rumus:

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = Jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani

b = Jumlah dokumen kerja sama yang diusulkan.

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan III Tahun 2025

**Tabel 23 Capaian IK Presentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati**

|                |                                                                                             |                |           |                |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |                |           |                |                         |
| <b>IK – 15</b> | <b>Presentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati</b>                                        |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                                  |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                               | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                           | -              | -         | <b>90</b>      | -                       |

**A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025**

Capaian IK ini diukur secara tahunan, sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan penandatanganan 3 dokumen kerja sama Ditjen PRL yaitu:

1. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PRL dengan PT Danareksa (Persero) tentang Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Komersialisasi Kawasan Ekonomi dalam Penataan Wilayah Pesisir dan Laut yang ditanda-tangani pada 15 Juli 2025;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PRL dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia tentang Dukungan Penataan Ruang Laut dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Karbon Biru yang ditanda-tangani pada 15 Juli 2025;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PRL dengan PT Informasi Geo Sistem tentang Pengembangan Sistem Pemantauan Laut dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Penataan Ruang Laut yang ditanda-tangani pada 10 September 2025.

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024**

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025. Selain itu, IKU ini tidak memiliki target triwulanan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1. Keberhasilan:

- Dukungan dan partisipasi aktif dari unit kerja teknis Ditjen PRL sebagai pemrakarsa kerja sama program PRL dalam proses penyusunan naskah kerja sama.
- Dukungan asistensi dari Biro Perencanaan dan Biro Hukum Setjen KKP dalam penyusunan rancangan PKS, terutama dalam kerja sama yang konteksnya baru bagi Ditjen PRL seperti kerja sama dengan perusahaan yang melibatkan pihak lainnya (anak perusahaan).

2. Kendala:

- Komunikasi dan koordinasi di level internal masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyusunan rancangan PKS agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh unit eselon II lingkup Ditjen PRL yang terkait.
- Adanya perbedaan pemahaman antara Ditjen PRL dengan mitra kerja sama dalam penyusunan rancangan PKS sehingga perlu meningkatkan intensitas koordinasi satu sama lain.

3. Solusi:

- Meningkatkan koordinasi di level internal untuk mempercepat proses finalisasi naskah kerja sama yang telah dibahas para pihak.
- Meningkatkan intensitas koordinasi antara Ditjen PRL dan mitra kerja sama.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah

1. Pembahasan Finalisasi Rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Penataan Ruang laut dan PT. Danareksa (Persero)
2. Pembahasan Finalisasi PKS Ditjen PRL dan KI
3. Rapat Pembahasan Draf Nota Kesepahaman antara PPAK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia
4. Audiensi kerja sama Ditjen PRL dan UNJ

5. Pembahasan Tindak Lanjut Kerja Sama antara Ditjen PRL dan *Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC)* Korea Selatan
6. Pembahasan Rencana Kerja Sama antara Ditjen Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) dan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang
7. Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penataan Ruang Laut dan Fakultas Hukum UNPAD
8. Pembahasan Rencana Kerja Sama antara Ditjen Penataan Ruang Laut dan Yayasan Rekam Nusantara
9. *Knowledge Exchange Program in Denmark on Marine Spatial Planning, Offshore Wind Development and Permitting*”, Denmark, 25-28 Agustus 2025
10. *JICA Knowledge Co-Creation Programs (Young Leaders): Agricultural and Rural Development (Fisheries and Blue Economy)*, Jepang
11. Audiensi Rencana Hibah *Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods (Blue-Coast) Project*
12. Rapat Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penataan Ruang Laut dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
13. Monitoring dan evaluasi kerja sama bilateral sektor kelautan dan perikanan
14. Pembahasan Rencana Kerja Sama dengan Pemerintah Jepang serta kegiatan menghadiri *World Osaka Expo 2025*
15. *World Osaka Expo 2025*, dan pertemuan bilateral antara Ditjen PRL, Pemerintah Jepang dan private sector terkait pengembangan penataan Kawasan Karbon Biru di Indonesia
16. *The 3rd Marine Spatial Planning Cooperation Workshop of Maritime Silk Road Partner Countries* di Beijing, China.



**Gambar 6 Penandatanganan PKS dengan PT Danareksa (Persero)**



**Gambar 7 Penandatanganan PKS antara Ditjen PRL dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia pada tanggal 15 Juli 2025**



**Gambar 8 Penandatanganan PKS antara Ditjen PRL dengan PT Informasi Geo Sistem pada tanggal 10 September 2025**

**F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025**

Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan pembahasan usulan kerja sama dan finalisasi rancangan naskah kerja sama yang diprakarsai oleh Satuan Kerja lingkup Ditjen PRL atau calon mitra di level nasional maupun internasional (bilateral).

## IK 16. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun

Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun merupakan dokumen yang disusun untuk digunakan oleh Delegasi Kementerian yang menghadiri pertemuan/perundingan Perjanjian Internasional. Dokumen Kertas Posisi ini dapat berupa masukan yang dihimpun dari DJPRL untuk disampaikan ke BHKLN atau dokumen yang disusun oleh DJPRL guna menghadiri pertemuan/perundingan perjanjian Internasional. Kertas Posisi sekurang-kurangnya memuat: agenda pertemuan; rincian informasi mata agenda; perkembangan isu setiap mata agenda; perkembangan Kerja Sama; suggested point of intervention; dan/atau usulan posisi Indonesia.

Formula Perhitungan:

Membandingkan antara jumlah dokumen kertas posisi yang disusun dengan jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional yang dihadiri pada periode April – Desember 2025. adapun penghitungannya dengan rumus:  $(a)/b \times 100\%$

Keterangan: a = Jumlah dokumen kertas posisi yang disusun; b = Jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan III Tahun 2025

**Tabel 24 Capaian IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun**

|                |                                                                                        |                |           |                |                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| SK – 1         | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut   |                |           |                |                         |
| IK – 16        | Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                             |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                          | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                      | -              | -         | 90             | -                       |

### A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Capaian IK ini diukur secara tahunan, sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah disusun 3 (tiga) dokumen Kertas Posisi pada pertemuan:

1. *The Second G20 Environment and Climate Sustainability Working Group* (ECSWG) di Skukuza, Afrika Selatan pada 14 - 18 Juli 2025.

2. *The Second Part of The Fifth Session of The Intergovernmental Negotiation Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, including in the Marine Environment* di Jenewa, Switzerland pada 5 – 14 Agustus 2025.
3. *Asean Digital Economy Framework* di Hanoi, Vietnam pada 4 - 8 Agustus 2025.
4. *Second Session of Preparatory Committee BBNJ* di New York, Amerika Serikat pada 18 – 25 Agustus 2025.
5. *The Second Consultative Meeting of the ATSEA Regional Coordination Committee (RCC) virtual meeting* pada 21 Agustus 2025.
6. *Knowledge Exchange Program “Marine Spatial Planning Offshore Wind Development and Permitting”* di Denmark pada 25 – 28 Agustus 2025
7. *Threatened Species Technical Working Group back to back with the Bismarck Solomon-Seas Seascape (BSS) Dialogue* di Solomon Island pada 22 - 26 September 2025
8. *Women Leaders Forum Regional Exchange for Coral Reefs Fisheries and Food Security* di Solomon Island pada 22 – 26 September 2025
9. *Business Forum and World Osaka Expo* di Osaka, Jepang pada 25 – 26 September 2025.

**Tabel 25 Kertas Posisi DJPRL**

| No | Kegiatan                                                                                                      | Waktu             | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>The Second G20 Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG)</i> di Skukuza, Afrika Selatan | 14 - 18 Juli 2025 | Dalam pertemuan ini DJPRL menyampaikan intervensi pada <i>technical paper</i> :<br>- <i>Advancing Marine Spatial Planning (MSP) for a Sustainable Blue Economy: G20 perspectives on policy and practice of biodiversity-inclusive MSP</i><br>- <i>Current impact of and mitigation measures for Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing</i> |

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                           | Waktu                | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                    |                      | <i>Gear (ALDFG) in the marine environment</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | <i>The Second Part of The Fifth Session of The Intergovernmental Negotiation Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, including in the Marine Environment</i> di Jenewa, Switzerland | 5 – 14 Agustus 2025  | Ditjen Penataan Ruang Laut memberikan masukan pada agenda article 8 tentang <i>Waste Management</i> diantaranya adalah terkait pencegahan dan pengurangan ALDFG dan juga integrasi tata ruang darat dan laut salah satunya dalam hal relokasi tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di dekat sungai untuk mengurangi pencemaran sampah di perairan darat dan laut. |
| 3  | <i>Asean Digital Economy Framework</i> di Hanoi, Vietnam                                                                                                                                                                           | 4 - 8 Agustus 2025   | Ditjen Penataan Ruang Laut memberikan intervensi pada materi <i>submarine cable system</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | <i>Second Session of Preparatory Committee BBNJ</i> di New York, Amerika Serikat                                                                                                                                                   | 18 – 25 Agustus 2025 | Ditjen Penataan Ruang Laut bersama delegasi RI dari KKP dan K/L lainnya memberikan intervensi dan menyampaikan posisi Nasional pada beberapa dokumen yang disampaikan oleh <i>co-chair</i> terkait persiapan BBNJ.                                                                                                                                                     |
| 5  | <i>The Second Consultative Meeting of the ATSEA Regional Coordination Committee (RCC) virtual meeting</i>                                                                                                                          | 21 Agustus 2025      | Indonesia menyampaikan posisi Nasional pada agenda pembahasan diantaranya <i>organizational matter, ATSEA RGM arrangement, ALDFG Regional Action Plan, GEF Median Size Project</i> dan <i>strategic development partner</i>                                                                                                                                            |

| No | Kegiatan                                                                                                                                 | Waktu                  | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Knowledge Exchange Program “Marine Spatial Planning Offshore Wind Development and Permitting”</i> di Denmark                          | 25 – 28 Agustus 2025   | Ditjen Penataan Ruang Laut melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Denmark untuk menindak-lanjuti peluang kerja sama terkait pengembangan <i>Offshore Wind</i> dari aspek MSP                                                                       |
|    | <i>Threatened Species Technical Working Group back to back with the Bissmarck Solomon-Seas Seascape (BSS) Dialogue</i> di Solomon Island | 22 - 26 September 2025 | Ditjen Penataan Ruang Laut bersama Delegasi Indonesia lainnya menyampaikan update capaian RPOA/NPOA dan juga praktik baik terkait <i>Threatened Species</i> dan <i>Bissmarck Solomon-Seas Seascape</i>                                                      |
|    | <i>Women Leaders Forum Regional Exchange for Coral Reefs Fisheries and Food Security</i> di Solomon Island                               | 22 - 26 September 2025 | Ditjen Penataan Ruang Laut bersama Delegasi Indonesia lainnya menyampaikan update capaian RPOA/NPOA dan juga praktik baik terkait peran perempuan di Indonesia pada <i>Coral Reefs Fisheries and Food Security</i>                                          |
|    | <i>Business Forum and World Osaka Expo</i> di Osaka, Jepang                                                                              | 25 – 26 September 2025 | Ditjen Penataan Ruang Laut bersama PT Danareksa menghadiri <i>World Osaka Expo</i> salah satunya adalah untuk mencari peluang kerja sama bilateral dengan pemerintah dan perusahaan Jepang khususnya di bidang investasi dan pengelolaan <i>blue carbon</i> |

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

1. Analisis Keberhasilan: Keberhasilan capaian ini didukung oleh komitmen Ditjen PRL dan instansi terkait lainnya dalam menentukan posisi Indonesia pada pertemuan internasional yang akan dituangkan dalam kertas posisi. Selain itu juga didukung dengan pemahaman *person in charge* (PIC) dari masing-masing direktorat teknis terkait isu pembahasan pada kertas posisi Indonesia di forum-forum internasional.
2. Kendala: Koordinasi dengan direktorat teknis maupun Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan kertas posisi masih terhambat sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam menghimpun bahan penyusunan kertas posisi.
3. Solusi: Meningkatkan intensitas koordinasi dengan direktorat teknis terkait dalam penyusunan bahan kertas posisi, pembahasan kertas posisi idealnya dilakukan secara tatap muka.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah:

1. Penyusunan Kertas Posisi *the 2nd G20 Environment and Climate Sustainability Working Group* (ECSWG) Meeting
2. Penyusunan Kertas Posisi Pemerintah RI *The Second Part of The Fifth Session of The Intergovernmental Negotiating Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, including in The Marine Environment* (INC-5.2)
3. *Regional Workshop on Ratification and Early Operationalization of the BBNJ Treaty: Regional Exercise for PrepCom 2* di Bangkok, Thailand
4. Persiapan *Preparatory Committee ke-2 Persetujuan Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ)

5. Pertemuan *ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) ke-13* di Hanoi, Vietnam
6. Pembahasan NPOA CTI-CFF
7. *Kick-Off Meeting* Persiapan Delegasi RI pada UNFCCC COP 30/CMP 30/CMA 7, SBSTA 63 & SBI 63, Belém, Brasil
8. *The Second Part of The Fifth Session of The Intergovernmental Negotiation Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, including in the Marine Environment (INC 5.2)* di Jenewa, Swiss, 4 – 14 Agustus 2025
9. Penyusunan Kertas Posisi Delegasi RI *the Second Session of the Preparatory Commission (Prepcom-2) Biodiversity Beyond National Jurisdiction*
10. Pertemuan *BBNJ Agreement Preparatory Commission 2*, di New York, Amerika Serikat, 18 – 29 Agustus 2025
11. Pelaksanaan Pertemuan CTI-CFF: *Threatened Species Working Group dan Women Leaders' Forum*
12. *CTI Threatened Species Technical Working Group's ShellBank & Blue Corridors for Turtles Socialization Workshop 6th Technical Working Group Meeting and back-to-back with the Bismarck Solomon-Seas Seascape (BSS) Dialogue* di Solomon Island
13. Rapat Persiapan Kunker MKP dan Persiapan COP30 UNFCCC.



**Gambar 9 Pertemuan BBNJ Agreement Preparatory Commission 2, di New York, Amerika Serikat, 18 – 29 Agustus 2025**



**Gambar 10 *The Second Part of The Fifth Session of The Intergovernmental Negotiation Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, including in the Marine Environment (INC 5.2)* di Jenewa, Swiss, 4 – 14 Agustus 2025**

**F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025**

Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan kegiatan pembahasan penyusunan kertas posisi yang akan digunakan oleh Delegasi Ditjen PKRL dalam pertemuan kerja sama luar negeri program PRL tahun 2025, salah satunya adalah pada pertemuan *Senior Officials' Meeting* CTI-CFF.

**IK 17. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik**

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk serta pihak internal atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Upaya yang dilakukan untuk Pelayanan Publik:

- a. Pengumpulan/Inventaris bahan pelayanan publik lingkup Ditjen PRL
- b. Membahas/menelaah/mengevaluasi dokumen pelayanan publik
- c. Penyiapan/penyusunan bahan/konsep/dokumen pelayanan publik yang diselesaikan dengan ketentuan dalam kurun waktu 1 tahun sebagai capaian Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang diselesaikan sesuai ketentuan

Dokumen Pelayanan Publik adalah kumpulan bahan atau laporan yang terkait dengan kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan dan/atau Inovasi Pelayanan Publik.

Dokumen Pelayanan Publik meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- b. Laporan Tata Laksana Perizinan

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen pelayanan publik yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen pelayanan publik yang ditentukan}} \times 100\%$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan III Tahun 2025

**Tabel 26 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik pada Triwulan III Tahun 2025**

|                |                                                                                             |                |           |                |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |                |           |                |                         |
| <b>IK – 17</b> | <b>Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik</b>                                        |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                                  |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                               | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                           | -              | -         | <b>100</b>     | -                       |

**A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025**

Pengukuran capaian dilakukan tahunan sehingga belum ada capaian pada Triwulan III Tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025. Namun, pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan

1. Pemenuhan Data Dukung Monev Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025 lingkup Ditjen PRL
2. Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi lingkup Ditjen PRL Tahun 2025
3. Pelaksanaan wawancara terhadap unit kerja yang diusulkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB dan Persiapan Evaluasi Lapangan terhadap Satker WBK/WBBM yang diusulkan kepada TPN
4. Pemutakhiran Data SIPPN Cari Yanlik tahun 2025
5. Pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Instansional Tahun 2025 lingkup DJPRL.

6. Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2025 lingkup DJPRL.
  7. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025 lingkup DJPRL.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024  
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada Tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan  
Capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah Tahunan.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan  
Dibandingkan triwulan sebelumnya IKM Ditjen PRL berpotensi meningkat karena akan adanya tambahan layanan baru yang akan mendukung IKM Ditjen PRL. Namun, secara legal layanan baru yaitu Layanan Konsultasi dan Pendampingan Laporan Tahunan KKPRL baru akan diproses di tahun depan melalui revisi Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan KKP.
- E. Kegiatan Pendukung  
Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam mendukung IK ini yakni
1. Penandatanganan Berita Acara (BA) Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2025 lingkup Ditjen PRL.
  2. Penandatanganan Berita Acara (BA) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Instansional Tahun 2025 lingkup Ditjen PRL.
  3. Pelaksanaan Validasi dan Publikasi IKM Triwulan III Tahun 2025 lingkup Ditjen PRL.
- F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025  
Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan

1. Penandatanganan Berita Acara (BA) Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2025 lingkup Ditjen PRL.
2. Penandatanganan Berita Acara (BA) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Instansional Tahun 2025 lingkup Ditjen PRL.
3. Pelaksanaan Validasi dan Publikasi IKM Triwulan III Tahun 2025 lingkup Ditjen PRL.

#### **IK 18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL**

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- a. Mengumumkan informasi publik
- b. Menyediakan informasi publik
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Kelembagaan
- e. Digitalisasi.

Formula perhitungan

- 1) Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).

- 2) SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.
- 3) Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.
- 4) Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80% dan presentasi sebanyak 20%.
- 5) Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

| No | Predikat          | Interval Sektor |
|----|-------------------|-----------------|
| 1  | Informatif        | 90 – 100        |
| 2  | Menuju Informatif | 80 – 89,9       |
| 3  | Cukup Informatif  | 60 – 79,9       |
| 4  | Kurang Informatif | 40 – 59,9       |

Berikut capaian dan perkembangan IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL

**Tabel 27 Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL**

|                |                                                                                             |                |           |                |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |                |           |                |                         |
| <b>IK – 18</b> | <b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL</b>                                             |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                                  |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                               | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                           | -              | -         | <b>91</b>      | -                       |

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025  
Capaian IK ini diukur secara tahunan, sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan III ini telah dilakukan persiapan penilaian keterbukaan informasi publik dengan mengumpulkan data dukung terkait.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024  
Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan IK ini yaitu tercapainya predikat informatif (minimal nilai yang dicapai yaitu 91) dengan memenuhi 5 komponen indikator dalam aspek penilaian oleh tim penilai internal KKP diantaranya mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, digitalisasi. Tidak ada kendala khusus dalam pencapaian IK ini.

E. Kegiatan Pendukung

1. Pelayanan Informasi Publik
2. Publikasi konten pada website PPID, DJPRL, media sosial, dan media massa
3. Penyusunan dan publikasi rekapitulasi informasi publik yang ditindaklanjuti Triwulan II
4. Publikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Informasi Publik TW II
5. Penetapan SOP Layanan Informasi Publik
6. Mengirimkan Surat Dinas kepada UPT Lingkup DJPRL untuk mengusulkan Daftar Informasi Publik 2025
7. Mengirimkan Nota Dinas kepada seluruh unit kerja lingkup DJPRL terkait Penyampaian Kelengkapan Data Dukung Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025
8. Penerbitan SK Daftar Informasi Publik DJPRL 2025
9. Pengisian Self Assessment Questioner (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik
10. Pembuatan video profil layanan informasi publik DJPRL 2025
11. Pemenuhan fasilitas ruang layanan informasi publik (banner informasi, maklumat pelayanan, SOP Layanan Informasi Publik, QR Code Survei Kepuasan Masyarakat, Foto Petugas Pelayanan Informasi Publik, Aplikasi Hear Me untuk kaum disabilitas tuna rungu dan tuna wicara, dan Laptop).

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan

1. Pelayanan Informasi Publik
2. Publikasi konten pada website PPID, DJPRL, media sosial, dan media massa
3. Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik

### IK 19. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut

Instrumen hukum merupakan bagian dari pembentukan produk hukum. Penyelesaian Instrumen hukum merupakan rancangan instrumen hukum yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut antara lain berupa Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal, surat edaran, kegiatan di bidang bantuan hukum, serta *legal opinion*.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan memproses penyelesaian dokumen instrumen hukum di bidang pengelolaan ruang laut yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan/atau penetapan

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan III Tahun 2025

**Tabel 28 Capaian IK Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut**

| SK – 1         | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut |                |           |                |                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| IK – 19        | Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut                          |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                           |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                        | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                    | -              | -         | 100            | -                       |

**A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025**

IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah terbit 14 (empat belas) Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut yakni

1. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
2. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 2 Tahun 2025 tentang Unit Kehumasan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

3. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
  4. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal penataan Ruang Laut
  5. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
  6. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Nama Pemangku Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
  7. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelola Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
  8. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
  9. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 14 Tahun 2025 tentang Panitia Rakernis Ditjen PRL.
  10. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 15 Tahun 2025 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut
  11. Keputusan Dlektur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
  12. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 17 Tahun 2025 tentang Nama Inovasi Pelayanan Publik
  13. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Konflik Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
  14. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Produk Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
- Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Faktor Pendukung dalam pencapaian target kinerja yaitu Pembahasan penyusunan rancangan instrumen hukum dilakukan secara intensif. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan K/L terkait, pemangku kepentingan dalam percepatan penyelesaian rancangan instrumen hukum. Tidak ada kendala khusus dalam pencapaian kinerja ini.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu:

1. Rapat masukan revisi UU 23 Tahun 2023 tentang Pemerintah Daerah
2. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Identifikasi Kebutuhan Regulasi Ditjen PRL Tahun 2025-2029
3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021
4. Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut tentang Tim Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru
5. Rapat Lanjutan Pengisian Data Dukung Indeks Reformasi Hukum KKP
6. Rapat Audit Tata Ruang Laut sebagai tindak lanjut kasus pemagaran laut di perairan kabupaten bekasi
7. Rapat Revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
8. Rapat koordinasi usulan Penyusunan Keputusan Presiden tentang Dewan Nasioanal Sabang
9. Pembahasan Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan dan Teguran Kinerja di Lingkungan Ditjen PRL
10. Rapat Pembahasan Revisi Rancangan Peraturan Pemerintah RTRWN dan Integrasi RTRL kedalam RTRWN
11. Pembahasan Pedoman Penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru
12. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang Perairan Darat
13. Rapat Sinkronisasi Penataan Ruang Laut dengan Pemerintah Provinsi yang sudah mempunyai Perda RTRWP sebanyak 22 Provinsi

14. Pembahasan Pedoman Tata Cara Penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru
  15. Pembahasan masukan revisi Permen KP 28 Tahun 2021 dan Pengaturan Penerbitan PKKPRL di KPBPB.
- F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025
- Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan
1. Pembahasan muatan substansi pembinaan pada usulan revisi PP 21 Tahun 2021
  2. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri tentang revisi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan bidang kelautan dan perikanan sub urusan penataan ruang laut
  3. Pembahasan usulan revisi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan KKPRL.

## **IK 20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi maka perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
- Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
  - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif  
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal  
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
  - a. penciptaan arsip (25%),
  - b. penggunaan arsip (25%),
  - c. pemeliharaan arsip (25%)
  - d. penyusutan arsip (25%)
2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
  - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),

- b. prasarana dan sarana (50%).

Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan organisasi baru meskipun masih menggunakan DIPA DJPKRL. Capaian Direktorat Perencanaan Ruang Laut merupakan capaian indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL. Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan III Tahun 2025.

**Tabel 29 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL**

|                |                                                                                             |                |           |                |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>SK – 1</b>  | <b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut</b> |                |           |                |                         |
| <b>IK – 20</b> | <b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL</b>                                            |                |           |                |                         |
| Tahun 2024     | Tahun 2025                                                                                  |                |           |                |                         |
| Capaian Tw III | Target Tw III                                                                               | Capaian Tw III | % Capaian | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK |
| -              | -                                                                                           | -              | -         | <b>70</b>      | -                       |

**A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025**

IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Namun, sampai dengan triwulan ini telah dilakukan penilaian pengawasan kearsipan lingkup KKP dengan nilai sementara sebesar 92.81 yang merupakan nilai Direktorat Perencanaan Ruang Laut sebagai unit kerja Eselon II di lingkup DJPKRL pada tahun 2024.

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024**

Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

**C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan**

Capaian indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah Tahunan.

**D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi**

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kearsipan yakni belum adanya gudang arsip, keterbatasan SDM fungsional kearsipan dan sarana prasarana pendukung kearsipan.

Solusi yang telah dilakukan adalah penyimpanan arsip pada Gudang BMN di Citayam dan sertifikasi kearsipan untuk peningkatan SDM Arsiparis di lingkup DJPRL.

E. Kegiatan Pendukung

Dalam rangka mendukung IK ini pada Triwulan III Tahun 2025, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan penilaian pengawasan kearsipan internal tahun 2025 tingkat Pusat
2. Asisten penilaian pengawasan kearsipan internal tahun 2025 tingkat UPT
3. Penilaian pengawasan kearsipan internal tahun 2025 tingkat UPT tahap 1
4. Penilaian pengawasan kearsipan internal tahun 2025 tingkat UPT tahap 2.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan Pembahasan Arsip PKKPR di lingkup DJPRL dan identifikasi dan inventarisasi arsip di lingkup PRL.

#### **IK 21. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun

ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula perhitungan

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

**Tabel 30 Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL**

| SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut |                |                            |                |                         |                            |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| IK – 21 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL               |                |                            |                |                         |                            |                              |
| Target Tw III                                                                               | Capaian Tw III | % Capaian                  | Target PK 2025 | % Capaian Thd Target PK | Target Akhir Renstra DJPRL | % Capaian Thd Target Renstra |
| 76                                                                                          | 100            | 131,5 atau 120 (kinerjaku) | 76             | 131,5                   | 80                         | 125                          |

**A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025**

Capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL pada periode triwulan III tahun 2025 ini adalah sebesar 100% dari target 76% atau tercapai 131,58% (kinerjaku 120%) Sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025 Hal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP triwulan 3 Tahun Anggaran 2025. Nilai tersebut didapatkan berdasarkan hasil penilaian 9 satker di lingkup DJPKRL.

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024**

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.

### C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- Faktor Pendukung dalam pencapaian target kinerja yaitu pengumuman rencana pengadaan barang jasa telah dilakukan melalui digitalisasi sistem informasi menggunakan aplikasi SIRUP. Pelaksanaan PBJ di lingkup DJPRL belum maksimal dilaksanakan karena tidak adanya SDM khusus yang bersertifikat PBJ.
- Adapun kendala yang dihadapi yaitu paket pengadaan barang jasa masih dalam penganggaran yang menyatu dengan eselon I lain, dimana sebelumnya satu unit organisasi PKRL.
- Solusi yang dapat dilakukan adalah pengumuman paket pengadaan melalui SIRUP telah dilakukan oleh masing-masing penanggungjawab eselon I.

### D. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan

1. Pengadaan Meubelair Ruang Kerja DJPRL
2. Pengadaan Jasa Konsultan
3. Pembuatan Paket Pengadaan dan pengumuman paket pengadaan
4. Pelaksanaan pengadaan barang jasa.

### E. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan pengadaan jasa konsultan.

## 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Setditjen PRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPRL. Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PRL Tahun 2025 adalah Rp4.534.770.000,- dengan sumber dana Rupiah Murni (RM). Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp470.927.000,-. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PRL sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp3.378.110.439 atau 74,49% dari total pagu anggaran termasuk blokir dan 83,13% dari pagu anggaran efektif.

Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen PRL, yang ditandai dengan tercapainya target beberapa indikator

pada Triwulan III Tahun 2025 dan beberapa indikator yang sudah berproses untuk pencapaian targetnya. Berikut rincian realisasi anggaran di lingkup Setditjen PRL sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.

**Tabel 31 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja Setditjen PRL per Unit Kerja di Lingkup Setditjen PRL**

| URAIAN                                  | PAGU +<br>Blokir (Rp) | Blokir (Rp)        | PAGU (Rp)            | REALISASI<br>(Rp)    |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Tim Kerja Program                       | 80.000.000            | 0                  | 80.000.000           | 22.357.000           |
| Tim Kerja Pengelola<br>Keuangan Dan BMN | 80.000.000            | 0                  | 80.000.000           | 31.287.244           |
| Tim Kerja SDMA<br>Dan Organisasi        | 80.000.000            | 0                  | 80.000.000           | 16.794.820           |
| Tim Kerja Hukum<br>Dan Advokasi         | 80.000.000            | 0                  | 80.000.000           | 52.574.280           |
| Tim Kerja Humas<br>Dan Pelayanan        | 80.000.000            | 0                  | 80.000.000           | 26.330.000           |
| Tim Kerja<br>Kerjasama Dan<br>Data      | 80.000.000            | 0                  | 80.000.000           | 19.009.590           |
| Tim Kerja Dukman                        | 4.054.770.000         | 470.927.000        | 3.583.843.000        | 3.209.757.505        |
| <b>Total RM</b>                         | <b>4.534.770.000</b>  | <b>470.927.000</b> | <b>4.063.843.000</b> | <b>3.378.110.439</b> |

*Sumber: Realisasi Anggaran Akrual SAKTI, 30 September 2025*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PRL Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PRL terdapat 21 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2025 sebesar 117,13 (termasuk kriteria istimewa).

Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 5 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL tercapai 88,94 dari target 66; 2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL tercapai 100 dari target 80; 3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL tercapai tercapai 100 dari target 80; 4) Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun tercapai 1 sesuai target; 5) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL tercapai 100 dari target 76.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Setditjen PRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPRL. Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PRL Tahun 2025 adalah Rp4.534.770.000,- dengan sumber dana Rupiah Murni (RM). Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp470.927.000,-. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PRL sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 mencapai

Rp3.378.110.439 atau 74,49% dari total pagu anggaran termasuk blokir dan 83,13% dari pagu anggaran efektif.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 yakni blokir anggaran dan keterbatasan SDM yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

## 4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PRL ke depan, sedang dilakukan Analisis Beban Kerja untuk memetakan kembali kebutuhan pegawai di lingkup Setditjen PRL.

## 4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi pada periode sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut, dengan bukti sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 32 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya**

| No | Rekomendasi                                                                                                           | Tindak Lanjut                                                                        | Link Bukti Dukung                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Melakukan revisi DIPA pembukaan blokir apabila sudah mendapatkan persetujuan relaksasi blokir efisiensi lingkup DJPRL | Revisi DIPA relaksasi blokir efisiensi anggaran belum dilaksanakan pada triwulan ini | -                                                                                                                                   |
| 2  | Peningkatan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan                                                           | Telah terdapat penambahan pegawai pada Sekretariat Ditjen PRL                        | <a href="https://portal-repo.kkp.go.id/s/Da dukrekomLKJSetdit PRL25">https://portal-repo.kkp.go.id/s/Da dukrekomLKJSetdit PRL25</a> |
| 3  | Belum adanya SOP informasi pelayanan publik                                                                           | Penetapan SOP informasi pelayanan publik                                             | <a href="https://portal-repo.kkp.go.id/s/Da dukrekomLKJSetdit PRL25">https://portal-repo.kkp.go.id/s/Da dukrekomLKJSetdit PRL25</a> |

## LAMPIRAN

### Gambar 11 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sespridjnenprl@kkp.go.id](mailto:sespridjnenprl@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Effin Martiana**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                      | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                     | TARGET |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.               | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut | 1.                         | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)                                                         | 66     |
|                  |                                                                                      | 2.                         | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL (Nilai)                                                 | 66     |
|                  |                                                                                      | 3.                         | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL (Nilai)                                             | 81,5   |
|                  |                                                                                      | 4.                         | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)                                         | 89     |
|                  |                                                                                      | 5.                         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)         | 80     |
|                  |                                                                                      | 6.                         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL (%) | 80     |
|                  |                                                                                      | 7.                         | Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)                                              | 3,5    |
|                  |                                                                                      | 8.                         | Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun (Dokumen)                                                   | 2      |
|                  |                                                                                      | 9.                         | Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)                     | <0,5   |
|                  |                                                                                      | 10.                        | Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)                                                           | 80     |
|                  |                                                                                      | 11.                        | Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL (Indeks)                                                   | 80     |
|                  |                                                                                      | 12.                        | Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)             | 100    |
|                  |                                                                                      | 13.                        | Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)                                                        | 91     |
|                  |                                                                                      | 14.                        | Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan (%)                         | 100    |
|                  |                                                                                      | 15.                        | Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)                                                   | 90     |

| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                            | TARGET |
|------------------|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |  | 16.                        | Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (%) | 90     |
|                  |  | 17.                        | Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik (%)                                          | 100    |
|                  |  | 18.                        | Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)                                           | 91     |
|                  |  | 19.                        | Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)                            | 100    |
|                  |  | 20.                        | Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)                                          | 70     |
|                  |  | 21.                        | Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%)                  | 76     |

**Data Anggaran:**

| NO.                                                                                  | KEGIATAN                                                                                | ANGGARAN (Rp.)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                                   | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | 4.534.770.000        |
| <b>Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025</b> |                                                                                         | <b>4.534.770.000</b> |

## Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp470.927.000 sehingga Pagu Efektif Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp4.063.843.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Effin Martiana**